



Peranan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Menjaga Nilai-Nilai Demokrasi Saat Pemilu Terselenggaranya

Alief Fadillah^{1*}, Nur Fadhilah², Fany Sabila³, Rico Kurniawan⁴, Wan Fazira⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRACT: The Indonesian state adheres to a democratic system where every citizen has the same rights in making decisions and participating in the formulation and representation for a better Indonesia. Sometimes the interests of democracy are sacrificed and the people do not get their rights for certain groups, especially before the general election for governors, mayors, DPR/DPRD and the President. The General Elections Supervisory Body (Bawaslu) which is the management and organizer of general elections in Indonesia has an important role in the implementation of general elections, including keeping democracy running for the people of Indonesia. Bawaslu must be able to keep democracy safe and carried out during elections so that there are no indications of fraud in elections and create honest and fair elections. This study uses a descriptive qualitative research method which aims to find out how the North Sumatra Bawaslu maintains democratic values during elections.

Keywords: Bawaslu, Democracy, Political

ABSTRAK: Negara Indonesia menganut sistem demokrasi dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dan ikut serta dalam perumusan dan keterwakilan untuk Indonesia yang lebih baik. Terkadang kepentingan demokrasi dikorbankan dan rakyat tidak mendapatkan haknya bagi golongan tertentu, terutama menjelang pemilihan umum gubernur, walikota, DPR/DPRD dan Presiden. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan penyelenggara dan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk menjaga demokrasi berjalan bagi rakyat Indonesia. Bawaslu harus bisa menjaga demokrasi tetap aman dan dilaksanakan pada saat pemilu agar tidak ada indikasi kecurangan dalam pemilu dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bawaslu Sumut menjaga nilai-nilai demokrasi saat pemilu.

Kata Kunci: Bawaslu, Demokrasi, Politik

Submitted: 09-08-2022; Revised: 11-08-2022; Accepted: 21-08-2022

*Corresponding Author: zuhri.ku@yahoo.com

LATAR BELAKANG

Seruan ``Kembali kepada rakyat`` selalu terdengar pada saat sebelum pemilihan umum akan bergulir, ketika kita memiliki tuntunan dari Nabi untuk menjalankan kebaikan dan pertobatan dan religius yang akan adanya perlindungan pada setiap manusia pada pengalaman yang sedang dilakukan dan persiapan untuk perjuangan moral baru.¹ Di setiap pesta rakyat/pemilihan umum (pemilu) tentunya kepentingan rakyat akan menjadi nilai jual yang tinggi dalam merangkul hak suara rakyat, dalam moral individu masyarakat telah belajar untuk mempercayai yang akan di capai dari hasil pesta rakyat. Menjunjung tinggi norma-norma demokrasi merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan pemilu. Bawaslu sebagai organisasi pada kepercayaan publik harus mempunyai tren citra positif menjadi suatu kaharusan tersendiri bagi bawaslu.²

Banyak partai politik yang bertarung pada ajang pemilu untuk perebutan kekuasaan yang tentunya melahirkan citra baik ataupun citra buruk. Maka bawaslu harus bisa melawan dari citra buruk dengan melakukan suatu citra buruk dengan melakukan hal-hal yang positif seperti menjaga secara langsung dalam pemilu dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi supaya masyarakat menjadi lebih pintar dalam menanggapi politik. Menanggapi isu-isu politik yang saat ini dengan gencar-gencarnya dilakukan oleh partai politik menjelang pemilu tentunya dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh partai dan calon akan membuat dinamika politik yang alot, dimana setiap partai dan calon akan mempunyai strategi dan taktik dalam memenangkan pasangan yang ada dalam pencalonan, baik itu secara jujur dan adil, maupun secara curang.

Demokrasi yang diharapkan menjadi hak rakyat atau pesta rakyat terkadang dilukai dengan cara-cara curang hanya demi suatu kemenangan. Tak ayal bahwasanya manusia terkadang lupa akan bawahannya ketika bertarung di atas yang menyebabkan tidak seimbangnya antara kepentingan politik dan pribadi, padahal wakil rakyat dipilih oleh rakyat untuk mengayomi, menjaga dan rakyat menjadi sejahtera. Jika nilai demokrasi saja dapat dilukai sama saja seperti melukai kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu harus bisa memberikan yang terbaik selama pemilu yang nantinya diadakan supaya terciptanya pemilu yang adil, bebas dan jujur.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian *Kualitatif Deskriptif* yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan analisis yang ada di lapangan pada pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi. Variable yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pegawai dari Bawaslu Sumatera Utara. Dalam proses pengumpulan data

yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini pertama diawali dengan mengidentifikasi masalah yang timbul dari komponen yang tidak diharapkan dan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi sesuai dengan keinginan yang ada, dalam penelitian ini kasus demokrasi yang tidak merata menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini. Fenomena yang terjadi ini menjadi tantangan bagi penulis untuk mencari jawabannya.

Dalam penelitian ini penulis juga membatasi batasan masalah untuk bisa menentukan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan dalam penelitian ini, dalam tulisan ini peneliti membatasi masalah dengan cara merancang pertanyaan-pertanyaan yang terkait demokrasi seperti, Apa saja nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan ketika pemilu berlangsung?, Bagaimana cara untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi ketika pemilu?, dan Apakah nilai-nilai demokrasi masih dimiliki di Sumatera Utara?. Dengan batasan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut penelitian yang dilakukan akan teratur dan tidak lari dari pembahasan.

Dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah menggunakan teknik wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dikumpulkan dari sampel yaitu pegawai Bawaslu Sumut, dalam wawancara tersebut penulis menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan atau berupa daftar isian sebagai pedoman untuk bertanya. Alasan penulis menggunakan teknik wawancara ialah informasinya lebih relevan dan kaya serta dengan informasi yang didapatkan akan membantu dalam melakukan penelitian tentang fenomena yang sedang diteliti.³

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana nilai-nilai demokrasi diterapkan ketika pemilu sedang berlangsung, apalagi kita tahu bahwasanya pemilu akan segera berlangsung dan tentunya pemilu yang mengatasnamakan demokrasi tetap terjaga dan masyarakat dan menentukan hak suaranya tanpa adanya paksaan dan penindasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi yang sistem pemerintahannya yang dijalankan merupakan sistem dari rakyat, oleh rakyat kepada rakyat. Demokrasi di Indonesia lumrah terjadi ketika pemilihan umum diselenggarakan. Ketika pemilu berlangsung banyak kita temukan seakan-akan menjadi ``pertandingan`` perebutan untuk mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Tidak heran ketika pemilu berlangsung terjadi banyak kecurangan seperti janji kampanye yang berlebihan bahkan ada yang sampai secara langsung mengganggu hasil pemilu seperti melakukan *money* politik dan pengelembungan suara dan jual beli suara yang tentunya hal ini dapat menyakitkan nilai-nilai demokrasi.⁴

Hilangnya demokrasi tentunya berasal dari apa yang diperebutkan yaitu kekuasaan, nilai demokrasi seharusnya bisa menjadi cerminan perilaku hidup sehari-hari yang dapat diwujudkan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan sehari-hari. Nilai pertama dalam demokrasi yang dikemas oleh Bawaslu adalah ketaatan pada peraturan yang berlaku. Bawaslu Sumatera Utara selalu mengingatkan kepada partai politik dan peserta pemilu untuk selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 448 ayat 1 dan ayat 2 pada huruf b, dan ayat 3 pada huruf c Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam undang-undang tersebut menyatakan jika pemilihan umum diselenggarakan atas partisipasi masyarakat Indonesia, aspirasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan politik bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih. Hal ini dilakukan sebagai tujuan dari meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.⁵ Untuk dapat menciptakan pemilu yang aman dan damai tentunya masyarakat harus diberikan pemahaman tentang hak-hak mereka saat pemilu berlangsung supaya mereka tetap memiliki hak pilih dan terhindar dari kecurangan oknum-oknum tertentu. Peranan Bawaslu sangat penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi agar tetap dijalankan, menurut salah satu staf Bawaslu Sumut yaitu Anju Oktaviandri Permani ada beberapa nilai demokrasi yang ditanamkan oleh Bawaslu Sumatera Utara dalam pemilu yaitu:

a. Menjamin tegaknya keadilan, keadilan menjadi hal yang penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, karena memposisikan keadilan pada rakyat dan memberikan pemahaman tentang menjaga demokrasi tetap berjalan pada masyarakat Sumatera Utara. Keadilan tentunya tidak mempunyai kedudukan, perbedaan status atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya didasari oleh rasionalitas, persamaan dan kebebasan guna menerapkan keadilan yang merata kepada tiap masyarakat.⁶

b. Penggunaan Kebebasan bertanggung jawab, setiap masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan yang dilakukan, nilai demokrasi tentunya termasuk dari tanggung jawab. Saat pemilu berlangsung setiap masyarakat mempunyai tanggung jawab dengan hak pilihnya karena yang akan dipilih tentunya merupakan dari hati nurani dan pilihan pribadi. Disinilah banyak oknum yang bermain dengan memberikan sogokan/suapan berupa uang atau sembako kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih, namun untuk terjalankannya pemilu yang adil dan jujur tentunya masyarakat harus pintar dalam menanggapi serangan fajar/suapan berupa uang atau apapun itu.

c. Perubahan Masyarakat sosial mengarah kepada perkembangan kemajuan yang dapat terjadi apa bila masyarakat melakukan pemilu secara damai tanpa adanya gejolak yang dapat mengakibatkan konflik.

d. Kepemimpinan dapat dipilih dengan teratur dan melihat bagaimana pencapaian yang telah dibuat oleh calon pemimpin supaya memberikan hal yang lebih baik untuk kepentingan bangsa (Presiden) terutama Sumatera Utara (dalam pemilihan gubernur/DPR/DPRD). Dalam suatu negara demokrasi yang diperintahkan dalam tindakan ialah menggantikan para pemimpin, pemilu yang menjadi ajang mencari pemimpin baru atau mempertahankan kepemimpinan atas dasar kepentingan masyarakat banyak.⁷ Ada satu konsepsi tentang demokrasi sebagai suatu sistem politik dimana para partai politik berlomba untuk mendapatkan suatu sebanyak-banyaknya dalam masa pemilihan.

e. Pengakuan terhadap keanekaragaman, Sumatera Utara mempunyai banyak keanekaragaman yang bermacam-macam, semboyan ``berbeda-beda tapi kita tetap satu`` juga termasuk dalam menjaga demokrasi tetap berjalan di Sumatera utara, dengan menjaga persatuan dan kesatuan tentunya nilai demokrasi akan terlaksanakan, Bawaslu Sumut juga diisi oleh orang-orang yang mempunyai keanekaragaman yang berbeda-beda maka bisa menjadi contoh bahwasanya pemilu ini milik masyarakat tanpa adanya perbedaan.

Dari lima nilai-nilai demokrasi yang dijalankan oleh Bawaslu Sumut membawa kepada keadilan kepada masyarakat dalam menentukan hak pilihnya dan paham bahwasanya mereka mempunyai tanggung jawab besar akan kepentingan yang lebih baik lagi. Bawaslu tentunya harus bertindak secara aktif dalam memberikan pengarahan dan juga sosialisasi terhadap pentingnya menjaga demokrasi kepada masyarakat supaya hak-hak warga negaranya terpenuhi.⁸ Peranan Bawaslu tidak lepas dari kontribusi masyarakat dalam mengawal pemilihan ilmu supaya makin menguatnya penerapan nilai demokrasi yang berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pastinya dalam menguatkan nilai nilai demokrasi kepada masyarakat menurut Dewi Mutiawa Siregar salah satu staf yang ada di Bawaslu menuturkan bahwasanya sudah ada upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Sumut dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat Sumatera Utara, antara lain cara yang digunakan ialah:

a. menyelesaikan segala sesuatu dengan cara musyawarah mufakat, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan kebersamaan dan mufakat termasuk mengedepankan asas mufakat melalui hasil pemungutan suara, dengan adanya pemilu tentunya mengurangi gesekan akibat persetuan politik jika pemimpin dipilih tidak melalui pemungutan suara. Bawaslu Sumut selalu meningkatkan kepada masyarakat Sumatera Utara untuk benar-benar menggunakan hak suaranya supaya tidak golput (golongan putih) yaitu orang-orang yang tidak

menggunakan hak suaranya, padahal satu suarapun sangat dibutuhkan untung kepentingan suara oleh calon supaya dapat memperoleh hak suaranya.

b. Saling menghormati antar suku, agama dan ras. Bawaslu Sumut sangat menekankan supaya dalam pemilihan umum tidak ada satu golongan yang merendahkan golongan yang lainnya apalagi sampai menistakan agama.

c. Saling menghormati pendapat orang lain, sebagai warga negara yang baik menghargai pendapat orang lain merupakan etika dasar dalam menjaga norma-norma kehidupan. Ketika pemilu berlangsung tentunya ada calon-calon pemimpin yang mempunyai ide dan gagasan serta visi misi dalam mengsucceskan kepemimpinannya nanti ketika dia menjabat nanti, terkadang ada intimidasi dari kelompok atau perorangan dalam menentukan pilihan seperti si A menyuruh untuk memilih ini dan si B menyarankan untuk memilih itu. Ketidakbebasan memilih bisa terjadi ketika ada tekanan dan paksaan sebelum melakukan memilih. Landasan dalam kebebasan berpendapat dan memilih tentunya berlandaskan normatif dengan asumsi bahwasanya masyarakat dapat menggunakan ekspresinya dan buah pemikirannya yang berupa pendapat.⁹ Dalam pemilu Bawaslu tentunya membebaskan masyarakat untuk berpendapat dalam menentukan pilihannya dalam menentukan kriteria dan juga mengkritik dari apa yang disampaikan oleh calon pemimpin dan tentunya harus bertanggung jawab.

d. Selalu menanamkan rukun tangga antar masyarakat, Bawaslu Sumut menegakan kepada masyarakat Sumatera Utara untuk tetap menjaga rukun tangga yang ada pada masyarakat walaupun berbeda pilihan tetapi harus tetap menjaga kerukunan.

Apabila kekuasaan itu dikatakan mampu untuk memaksakan kehendak ke pihak lain berarti pihak yang berkuasa yang menentukan kehendaknya.¹⁰ Untuk menjaga nilai demokrasi supaya tetap berjalan kekuasaan negara yang tertinggi berarti kekuasaan yang menentukan kekuasaan pada negara tersebut. Kebudayaan politik suatu masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai keyakinan yang empiris, simbol simbol ekspresi dan nilai nilai yang menentukan situasi ketika politik sedang berlangsung.¹¹ Bawaslu harus bisa melihat pergerakan partai politik dan para calon legislatif dengan pengawasan supaya tidak terjadi kecurangan sebelum terlaksananya pemilu maupun pemilu berlangsung hingga selesai pemilu. Indonesia yang menganut sistem demokrasi negara demokrasi dan pemilihan umum menjadi pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Bawaslu sebagai badan pengawas pada pemilihan umum tentunya dengan peranan dan juga pengawasannya diharapkan dapat membuat pemilu yang akan dapat bersifat jujur, adil dan aman seperti yang disampaikan oleh Rico Ari staf Bawaslu Sumut bahwasanya pada pemilu 2019 di Sumatera Utara berjalan dengan lancar, aman dan damai serta masyarakat Sumatera Utara

saling menghormati antar etnis. Semoga pemilu yang akan datang tetap terjaga pesta demokrasi yang ada di Indonesia supaya menciptakan pemimpin yang jujur, adil dan amanah dalam menjalankan tugasnya kelak sebagai pemimpin dan wakil rakyat

PENUTUP

Dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi diharapkan pemilu yang terjadi di Sumatera Utara bisa berjalan dengan baik dan lancar dan mendapatkan pemimpin yang membawa kepada arah perubahan yang lebih baik untuk mencapai Indonesia dan Sumatera Utara yang lebih baik. Politik yang jujur, adil dan mengedepankan nilai-nilai demokrasi menjadikan masyarakat menjadi lebih dewasa serta dapat berkembang dengan keadaan zaman. Melalui hak suara yang merupakan realitas tertinggi dalam demokrasi dalam pemilihan umum untuk mereka yang berharap menjadi pemimpin dan wakil rakyat di Sumatera Utara tentunya dengan nilai demokrasi yang telah dipertahankan oleh Bawaslu Sumatera Utara akan menjadi Sumatera Utara yaitu provinsi yang taat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Dinie Anggeraeni, Nia Sofiyatul Milah. (2017). SKKP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. Diakses pada 17 Agustus 2022. 5 (20) 355-366. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1583>.
- Jane Addam. (2020). Demokrasi dan Etika Sosial. Yogyakarta: Penertib Indotole ransi.
- Jurdi Fathullah. 2014. Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Joeinarto. 1990. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khairunnisa Akhirah Andi. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Membentuk Produk Hukum Oleh Pemerintahan Daerah. Diakses pada 17 Agustus 2022. 5 (1) 6-68. <https://doi.org/10.313265/jk.v5i7.15887>.
- Kurniawan Dedi. (2014). Komunikasi CSR Politik. Jakarta: Prenadamedia.
- Rahadi Dedi Rianto. (2010). Konsep Penelitian Kualitatif. Jakarta: Filda Fikrindo.
- Rahmad Abd. (2018). Kebebasan Berpendapat dan Informasi Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo. Diakses pada 17 Agustus 2022. 03 (01) 81-94. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.531>.

Suheri Ana. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Nasional. Diakses pada 17 Agustus 2022. 4 (01) 99-111. <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/76>.

Varma. (2003). Teori Politik Modern. Jakarta: Raja Grafindo.

Yusuf Ami. (2014). Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.